



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salahuddin
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pepen Nazaruddin
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA,
Ditjen Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

Salahuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81
		Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
		Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90
		Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100
		Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	71
		Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	2
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	75
		Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	71
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
Program Perlindungan Sosial	Rp. 66.376.000.000,-
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	Rp. 66.376.000.000,-
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp. 79.179.009.000,-
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 4.103.898.000,-
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	Rp. 71.636.071.000,-
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.499.390.000,-
4. Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Rp. 939.650.000,-
Jumlah	Rp. 145.555.009.000,-

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA,
Ditjen Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

Salahuddin